



Pengelolaan Dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak

Lalu Muhamad Sirajudin^{1✉}, Muhammad², L. M. Nurul Wathoni³, Ismail⁴, Yudin Citriadin⁵

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia^{1,2,3,4,5}

e-mail : 220403036@uinmataram.ac.id¹, muhammad11@gmail.com², lalu.wathan@gmail.com³

Abstrak

Pengelolaan biaya pendidikan yang tepat dan terarah terlihat dari bagaimana sekolah mengadakan program-program pengembangan kualitas guru dan murid. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Penggunaan Dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dimana dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa datanya menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Penggunaan Dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat sudah dilaksanakan dengan baik, yang meliputi (1) Pembentukan Tim Kerja Keuangan Sekolah, (2) Perencanaan Bersumber pada Platform Raport Pendidikan (3) Pembuatan RKAS BOS dan RAPBS BPP, (4) Permasalahan Perencanaan dan Teknik Mengatasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS di SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan fungsinya dalam meningkatkan operasional sekolah, terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas guru dan siswa-siswinya.

Kata Kunci: Program BOS, Dana BPP, Sekolah Penggerak

Abstract

Proper and targeted management of education costs can be seen in how schools hold quality development programs for teachers and students. For this reason, the purpose of this study is to find out how the Planning for the Use of BOS Funds and BPP Funds for SMAN 1 Gerung Driving School West Lombok Regency. The method in this study uses a qualitative approach with the type of case study research, where data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. The data analysis uses data collection, data condensation, data presentation, and data verification. Based on the results of the study, it can be concluded that the Planning for the Use of BOS Funds and BPP Funds for the Driving School of SMAN 1 Gerung, West Lombok Regency has been carried out well, which includes (1) the Formation of a School Financial Work Team, (2) Planning Sourced from the Education Report Card Platform (3) Preparation of RKAS BOS and RAPBS BPP, (4) Planning Problems and Techniques for Overcoming Them. So, it can be concluded that the use of BOS funds at SMAN 1 Gerung, West Lombok Regency has been following its function in improving school operations, especially in terms of improving and developing the quality of teachers and students.

Keywords: BOS Program, BPP Fund, Driving School

PENDAHULUAN

Tercapainya tujuan dari pendidikan menurut (Munir Yusuf, 2018) menjadi harapan yang dicita-citakan bagi Negara Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni dengan cara memberikan support biaya pada proses keberlangsungan pendidikan melalui media Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan memberikan kebebasan pada setiap Lembaga Pendidikan untuk menentukan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) nya sendiri. Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan akan memberi kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Hal ini berarti, kualitas pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan akan berkualitas jika seluruh komponen pendidikan ikut terlibat. Faktor-faktor dalam proses pendidikan meliputi; bahan ajar, metodologi, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan, ataupun prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Proses dan hasil pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan bila tidak didukung dengan sumber dana dan penganggaran yang terarah dan terencana sebab salah satu komponen dalam manajemen pendidikan adalah tersedianya dana.

Elemen utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, (Mulyadi & Mardiana, 2022) yakni; berupa pembiayaan pendidikan. Jika manajemen pembiayaan dapat dijalankan dengan baik, maka *feedback* yang didapatkan lembaga tersebut akan meningkat. Oleh karena itu tiap Satuan Pendidikan harus mampu mengatur dana alokasi mulai dari langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua macam sumber untuk memperoleh biaya pendidikan, yaitu masyarakat dan pemerintah. Biaya yang bersumber dari masyarakat berupa iuran siswa yang berwujud SPP, atau sumbangan pembiayaan pendidikan, serta sumbangan sukarela dari masyarakat. Pembiayaan Pendidikan bersumber dari pemerintah, terbagi menjadi dua yaitu APBN dan APBD yang diimplementasikan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan APBD provinsi maupun kabupaten yang diperuntukkan bagi pendidikan.

Imam Al-Ghazali menyebut pendidikan sebagai suatu usaha yang berorientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dunia, dan akhirat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan itu pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Pendidikan pada konteks ini ditujukan untuk membangun dan mengembangkan manusia secara komprehensif, (E. Mulyasa, 2010). Bukan hanya untuk membangun ataupun mengembangkan keterampilan dan pengetahuan semata, melainkan pendidikan itu juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk budi pekerti luhur, serta untuk mewujudkan individu yang sehat secara rohani dan jasmani, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan dapat memiliki rasa tanggung jawab dalam urusan bermasyarakat, dan berbangsa.

Pengelolaan biaya pendidikan adalah bagian penting yang harus dikelola dengan baik, benar, dan tepat sasaran. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh (Akdon, 2018) bahwa biaya pendidikan amat menentukan setiap upaya penyampaian dari tujuan pendidikan, baik bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, sehingga pengelolaan biaya pendidikan itu harus benar-benar dikelola sebagaimana tata aturan yang telah tersedia. Biaya adalah bagian yang integral dalam kajian manajemen pendidikan, dan memiliki potensi yang amat menentukan, (Nanang Fattah, 2018). Saat ini implementasi dari upaya tersebut belum bisa dikatakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan fakta temuan yang mendasarinya, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Muhtadi Hairi pada tanggal 1 Juli tahun 2020 dalam (Donnelly, 2003) mengatakan bahwa implementasi dari pengelolaan biaya pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah) di Satuan Pendidikan belum bisa dipahami dengan baik, terutama memilah belanja yang masuk ke dalam aset dan yang menjadi barang jasa, dan tidak semua Satuan Pendidikan memahami poin-poin yang ada di dalam juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kualitas SDM masih ada yang kurang. Menurut Iwan dalam wawancara pada tanggal 1 November 2023 mengatakan sekolah-sekolah yang ada di NTB sebagian besar memang belum bisa mengelola dana BOS dan

dana BPP secara pasti dan terarah, terutama di Pondok-Pondok ataupun SMA Swasta yang ada. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Sarifah dalam wawancara pada tanggal 2 November 2023 dengan mengatakan bahwa masih banyak yang belum memahami langkah pengelolaan dana BOS dan dana BPP, sehingga penggunaan dana tersebut belum akurat.

Sedangkan terkait BPP, pengelolaan BPP masih banyak juga yang tidak sesuai dengan Panlak, sehingga mewujudkan beberapa persoalan, diantaranya; adanya orang tua/wali siswa yang merasa terbebani oleh pihak sekolah karna mahal biaya yang harus dikeluarkan, (Didin Kurniadin & Imam Machali, 2014). Pada kasus yang lain, realisasi BPP dianggap tidak jelas sehingga menimbulkan pertanyaan besar dari pihak orang tua/wali siswa. Persoalan ini juga selaras dengan penyampaian dari Ombusmen RI, (Titis Anis Fauziyah, 2023) yang menyatakan bahwa terdapat 70 laporan yang diterima Ombusmen Jateng mengenai pungutan biaya di sekolah Negeri dari orang tua/wali yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Negeri di daerah Jawa Tengah. Laporan ini adalah representasi kekecewaan orang tua/wali siswa terkait ketidaktepatan penyaluran BPP yang ada di tempat anak mereka bersekolah.

Persoalan mengenai pengelolaan BPP yang tidak sesuai dengan regulasi di daerah-daerah yang lain juga masih banyak terjadi, salah satunya sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut (Harsono, 2019), mengatakan, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih banyak sekolah-sekolah yang ditemukan tidak menyesuaikan BPP dengan aturan yang ada di Panlak BPP, salah satu contohnya terdapat siswa ataupun siswi di sekolah yang seharusnya tidak membayar dana BPP, menjadi ikut membayar dana BPP. Sedangkan di dalam Panlak sudah tertera mengenai tata aturan, tujuan dan juga sasaran bagi siswa ataupun orang tua/wali yang membayar dan tidak membayar BPP sekolah.

Ketidakmampuan pengelolaan biaya pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, (Inggit Hascaryani, 2022). Berbagai permasalahan dapat terjadi ketika biaya pendidikan dana BOS dan dana BPP tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabel, (Aulia Riski, 2018). Sebagaimana kasus-kasus yang terkait, seperti kasus korupsi dana BOS SMAN 1 Kuanfatu, kasus korupsi, menurut (Zaenab Hanim, 2023) dana BOS Kepala MAN Binjai, ataupun korupsi dana BOS Kepsek SMK Mustafa Kamil, ataupun permasalahan lain yang berhubungan dengan dana BPP, seperti dugaan penyalahgunaan dana BPP, dugaan penggelapan dana BPP, ataupun dugaan-dugaan penyelewengan dana BPP itu sendiri, (Wahyudi, 2023). Melihat pada fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan di suatu lembaga tertentu akan mengalami degradasi, tidak meningkat, dan bisa menyebabkan penutupan suatu Lembaga Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan dana BOS dan dana BPP di Lembaga Pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus dikelola dengan baik dan benar, terorganisir, dan tepat sasaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan harus disandarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Keseluruhan Lembaga Pendidikan yang ada tersebut, harus mengikuti prinsip-prinsip yang sudah tertuang, baik pada tingkat SD/MI, MTs/SMP, ataupun pada tingkatan SMA/MA. Karena dengan begitu harapan besar yang menjadi cita-cita bersama akan dapat terwujud. Salah satu Satuan Pendidikan/Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dianggap relevan dalam mengimplementasikan pengelolaan dana BOS dan dana BPP, yakni SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Menurut (Sarifah, 2023) dalam wawancara pada tanggal 2 November 2023 menguraikan bahwa SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat sudah dari dulu menjadi Sekolah Rujukan dan Pengimbas bagi sekolah-sekolah yang lain, dan juga menjadi sekolah pengimbas bagi sekolah-sekolah besar seperti SMAN 6 Mataram, SMAN 4 Mataram, SMAN 1 Lembar, dan SMAN 2 Gerung. SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat ini sudah menjadi Sekolah Pengimbas baik dalam hal manajemen sekolahnya, ataupun dalam hal teknik pengelolaan dana BOS dan dana BPP. Uraian Sarifah diperkuat oleh Iwan dalam wawancara pada tanggal 1 November 2023, yang menguraikan bahwa SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat memiliki manajemen

yang cukup bagus, hal ini terlihat dari ARKASnya, ketepatan waktu laporan, dan cepat dalam merumuskan RPJM Sekolah ataupun RKT sekolah.

Lebih lanjut disebutkan bahwa baiknya pengelolaan biaya pendidikan di SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat direpresentasikan juga dari siswanya yang berprestasi dan banyak diterima di Universitas ternama di Indonesia, seperti UI, UGM, UMY, UMM, UB, UNRAM, dan beberapa kampus UIN yang ada di Indonesia. Langkah pengelolaan biaya pendidikan yang tepat dan terarah tersebut terlihat dari bagaimana sekolah ini mengadakan program-program pengembangan kualitas guru melalui acara-acara semacam seminar, workshop atau pelatihan, pengelolaan sarpas sekolah, dan pengadaan beragam kebutuhan pengembangan guru dan murid, serta sekolah ini juga menjadi salah satu Sekolah Penggerak yang dimandatkan untuk mewujudkan visi Indonesia, (Bellah Khofifah & Muhammad Syaifudin, 2023)

Dari hasil wawancara dengan Rachmat Hidayat pada tanggal 2 Desember 2023 tersebut, menguatkan secara teoritis terhadap penelitian ini dan juga menjadi penguat bagi data yang ada mengenai baiknya pengelolaan dana BOS dan dana BPP di SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Dikatakan bahwa program ataupun kegiatan yang dilaksanakan memiliki relevansi dengan proses pengelolaan biaya pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya proses pengelolaan dana BOS dan dana BPP di SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat ini memberikan rangsangan ketertarikan tersendiri kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BPP yakni; pertama Ahmad Syahbuddin, "*Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Langsa)*" (Syahbuddin, 2019) Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan itu terletak pada aspek pengelolaan dana BOS saja. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan, memiliki banyak perbedaan, yakni; penelitian ini hanya berfokus pada manajemen pengelolaan dana BOS, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pengelolaan dana BOS dan dana BPP, yang terdiri dari empat fokus permasalahan, yakni; perencanaan pengelolaan, pengelolaan, teknik evaluasi pengelolaan, dan juga implikasi pengelolaan dana BOS dan dana BPP..

Kedua, Inggit Hascaryani, dengan judul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Yang Bersumber Dari Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Mencapai Tujuan Sekolah di SMPN 1 Ceper*" (Inggit Hascaryani, 2022) penelitian ini berbeda dalam banyak hal, yakni; penelitian oleh Inggit ini hanya berfokus pada manajemen pengelolaan yang bersumber dari dana BOS, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pengelolaan dana BOS dan dana BPP, yang terdiri dari empat fokus permasalahan, yakni; perencanaan pengelolaan, pengelolaan, teknik evaluasi pengelolaan, dan juga implikasi pengelolaan dana BOS dan dana BPP. Selain itu, ditemukan juga perbedaan pada lokasi penelitian dan tingkatan Sekolah, yakni; lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di SMAN 1 Gerung, Kab. Lombok Barat, sedangkan penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Caper.

Ketiga, yakni penelitian dengan judul, "*Manajemen Sumber Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Santri (Study Multi Situs Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannaj Pacet)*" (Nur Faizah, 2020) Persamaan penelitian ini terletak pada aspek mengenai pembiayaan pendidikan saja, dan untuk perbedaannya, penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan banyak sekali perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan mengenai fokus penelitian. Fokus penelitian ini berfokus pada manajemen sumber pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Santri. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak berfokus pada keterhubungan antara manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu Santri, melainkan hanya berfokus pada pengelolaan dana BOS dan dana BPP yang terdiri dari empat fokus permasalahan, yakni; perencanaan pengelolaan, pengelolaan, teknik evaluasi pengelolaan, dan juga implikasi pengelolaan dana BOS dan dana BPP.

Keempat, Penelitian yang membahas terkait dengan sekolah penggerak adalah penelitian yang dilakukan oleh (Novayanti et al., 2023), dimana dalam penelitian tersebut sebenarnya topik pembahasannya adalah dampak dari implementasi dari sekolah penggerak itu sendiri bagi sekolah dan manajemennya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BPP bagi sekolah penggerak, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Dapat dikatakan bahwa penelitian terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana BPP sekolah penggerak belum ada yang meneliti sehingga penelitian ini adalah penelitian baru yang perlu dan terus menerus untuk dikembangkan dalam berbagai perspektif sehingga dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena model penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap proses, peristiwa, ataupun perkembangan dimana data yang nantinya akan dikumpulkan berupa keterangan-keterangan yang bersifat kualitatif, dan hasilnya tidak dijadikan sebagai generalisasi sebagaimana penelitian kuantitatif. (Rusdin Pohan, 2019)

Instrumen utama pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data-data yang ada dan membandingkan dengan data-data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara, beserta dokumentasi. Oleh karena itu Peneliti akan terjun ke lokasi penelitian, yakni di SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat untuk mencari data-data yang relevan dengan fokus permasalahan; yakni; perencanaan penggunaan dana BOS dan dana BPP, pengelolaan dana BOS dan dana BPP, Teknik Evaluasi Pengelolaan dana BOS dan dana BPP dan implikasi penggunaan dana BOS dan dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi ini karena SMA Negeri 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat awalnya merupakan rintisan sekolah model dan pada tahun 2016 ditetapkan sebagai SMA Rujukan di Kabupaten Lombok dan sekarang menjadi salah satu dari 3 Sekolah Penggerak Kabupaten Lombok Barat.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer (Suharsini Arikunto, 2013) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara) baik individu maupun kelompok. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara tidak terstruktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara Keuangan, Koordinator Tata Usaha, Ketua Tim Pengelola Biaya Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Operator, dan Perwakilan Guru SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara pihak lain. Data sekunder ini bisa berupa bukti, catatan, ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip atau dokumenter. Data sekunder ini akan didapatkan melalui dokumen, buku-buku, atau data-data yang relevan dengan pengelolaan dana BOS dan dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung, Kab. Lombok Barat

Beberapa teknik yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian ini yaitu **(1) Observasi**, artinya peneliti terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti, tujuannya agar terdapat gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, **(2) wawancara**, pada teknik pengumpulan data ini, menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, agar wawancara yang akan dilakukan tidak menjadi kaku, sebagaimana teknik wawancara terstruktur dan yang menjadi informan yaitu kepala sekolah, bendahara BOS dan BPP, tim pengelola biaya, operator dan perwakilan guru SMAN 1 Gerung, dan yang ke **(3) Dokumentasi**, adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen ini adalah perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara peneliti dalam penelitian kualitatif. (Lexy J. Moleong, 2011).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yakni **(1) pengumpulan data**, data yang akan dikumpulkan peneliti akan berfokus pula pada data yang relevan mengenai; perencanaan penggunaan dana BOS dan dana BPP, pengelolaan dana BOS dan dana BPP, teknik evaluasi pengelolaan dana BOS dan Dana BPP dan implikasi penggunaan dana BOS dan dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. **(2) penyajian data**, penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyajian data berupa teks yang bersifat naratif, **(3) data condensation**, artinya proses menyeleksi data, focusing/memfokuskan data yang ada, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah catatan lapangan (observasi), transkrip wawancara, dan dokumentasi, serta materi temuan lain di lapangan, **(4) verifikasi data**, yaitu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara bertahap sehingga diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti (1) Kredibilitas, dilakukan apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dalam data penelitian sehingga peneliti terjun kembali ke lapangan, (2) dependabilitas, yaitu peneliti melakukan review terhadap penelitian ini dengan melibatkan beberapa ahli dibidangnya, (3) konfirmabilitas, yaitu dilakukan interpretasi terhadap data-data penelitian dengan melakukan pelacakan dan lain-lain. Dan (4) transferabilitas, yaitu peneliti menguraikan secara rinci atau melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, tentu peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap informan. Adapun wawancara pertama terkait dengan Tim Kerja Keuangan Sekolah yakni kepala sekolah yang mengatakan bahwa;

“Kebijakan dana BOS telah diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar nasional sejak tahun 2005. Pengelolaan dana BOS tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola secara independen, dalam hal ini tim Bos reguler sekolah. Artinya peranan tim tersebut adalah sangat krusial dalam memastikan keefektifan pengelolaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan lalu Aris Munandar selaku bagian administrasi sekolah mengungkapkan sebagai berikut:

“Tim BOS reguler sekolah terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab dan bendahara, dan satu orang unsur guru serta unsur komite sekolah yang ditunjuk selaku anggota. Peranan bendahara BOS sekolah pun sangat krusial dalam pengelolaan dana BOS. Peranan tersebut telah dimulai dari proses perencanaan penyimpanan penatausahaan, verifikasi dan sampai pada tahap pelaporan dana BOS. Namun demikian, pelaksanaan peranan bendahara dana BOS di lapangan beragam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khadijah selaku tenaga administrasi sekolah mengungkapkan sebagai berikut;

“Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat diterapkan dengan menggunakan asas pemisahan tugas koma perencanaan koma pembukaan setiap transaksi pelaporan dan pengawasan titik penggunaan dana bos sebagai salah satu wadah pemasukan sekolah koma perlu dikelola dengan baik dan benar untuk kepentingan peserta didik titik pengelolaan keuangan bos diatur oleh pemerintah melalui aturan petunjuk teknis tahun 2013 yang menyebutkan bahwa ada 7 prinsip utama pengelolaan berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah atau dengan akronim mbs yang harus dijalankan oleh sekolah.”

Tema kedua yang ditanyakan yakni terkait dengan Perencanaan Bersumber pada Platform Raport Pendidikan. RAPBS memuat rencana dan pertanggungjawaban kegiatan, perincian program, perincian kebutuhan barang dan sarana serta jumlah total anggaran menyeluruh serta keterkaitannya dengan kegiatan pada periode tertentu. Jadi penyusunan keuangan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAPBS. Maka dari itu untuk menjadikan dana BOS berfungsi dengan sebaik-baiknya dan kebutuhan sekolah tercukupi, pengelola

memasukkan di dalam RAPBS rencana kegiatan yang akan dilakukan sekolah dan kegiatan tersebut dapat dibiayai dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala mengungkapkan sebagai berikut:

“Proses perencanaan pengelolaan dana BOS komponen yang terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah sebagian dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS oleh tim manajemen BOS sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder sekolah yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah dan mereka menjalankan perannya masing-masing.”

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah ketika berada di ruangan mengungkapkan sebagai berikut:

“Proses perencanaan dana BOS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah bendahara sekolah dewan guru dan komite sekolah semua yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yaitu sebagai tim manajemen Bos, sedangkan bendahara Bos: menyusun perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen Bos dengan diketahui oleh komite sekolah guru, karyawan dan orang tua siswa”

Tema ketiga yaitu Pembuatan RKAS BOS dan RAPBS BPP. Pembuatan RKAS BOS dan RAPBS BPP dalam prosedur ini adalah proses pertama dalam merencanakan suatu program di mana kepala sekolah dan tim yang perencana melakukan pengumpulan data mengenai program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Dalam prosedur penyusunan RAPBS yaitu melaksanakan identifikasi dan inventarisasi rencana kegiatan atau program. Penyusunan RKS dilaksanakan pada awal pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

“Penyusunan RKAS di SMAN 1 Gerung dilaksanakan pada awal pembelajaran dan penyusunan RKAS selalu melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Sebelum penyusunan RKAS terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan dalam satu tahun pelajaran titik analisis kebutuhan melibatkan guru dan komite sekolah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah ketika bertemu di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa:

“Analisis kebutuhan yang dilakukan di SMAN 1 Gerung kebutuhan dilakukan selama 1 tahun pelajaran sehingga analisis kebutuhan selalu melibatkan guru dan komite sekolah dan analisis kebutuhan perlu dilaksanakan untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menganalisis kondisi lingkungan sebelum menyusun program.”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak guru yang mengungkapkan bahwa:

“Analisis kebutuhan sekolah itu adalah sangat penting karena untuk mengetahui kebutuhan sekolah dalam satu tahun pelajaran analisis kebutuhan ini melibatkan guru sebagai pelaku utama ada komite sekolah yang selalu mengawasi dan kepala sekolah yang menjadi pemegang kekuasaan terlebih di dalam pelaksanaan dan perannya di dalam sekolah terutama peran kepala sekolah dalam penyusunan RKAS.”

Terakhir yakni terkait dengan Permasalahan Perencanaan dan Teknik Mengatasinya. Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

“Permasalahan dalam perencanaan dana BOS terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kendala jaringan dan server mulai dari pusat dinas maupun sekolah. Gangguan waktu perubahan atau pergeseran. Operator sekolah malas mencari menu pada aplikasi oleh bendahara atau operator. Laptop yang digunakan oleh operator sekolah dengan aspek yang sangat kurang memadai Selain itu berkaitan dengan delapan standar yang belum sepenuhnya dipahami oleh sekolah. Apabila ada barang yang belum ada dalam kode anggaran tidak dilaporkan, sehingga operator salah tempat masuk”

Wawancara dengan staf administrasi sekolah juga mengungkapkan bahwa:

“Permasalahan-permasalahan dalam pencairan dana BOS sering terjadi hampir setiap tahun misalnya operator malas menggeser akhirnya timbul Silva dan ada juga salah kode aktivasi bahkan bendahara kadang-kadang tidak tahu kode anggaran Akhirnya salah geser salah pengedit pengeditan atau pengetikan seperti salah memasukkan pada kolom atau salah tanggal pada Sir BOS di kartu buku.”

Hasil wawancara lain dengan salah satu anggota komite sekolah yang mengungkapkan bahwa:

“Banyaknya permasalahan yang timbul dalam mengajukan dana BOS akibat kurang pahamnya operator baik itu di dalam mengajukan persetujuan RKAS karena tidak tahu tempat atau belum validnya data Selain itu adanya kesalahan update data siswa di Dapodik sehingga manajemen didikbud akan berpengaruh pada verval data”

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah adalah pengelolaan yang baik, efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah melalui suatu proses kerja sama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMAN 1 Gerung Lombok Barat didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen dana bantuan operasional sekolah dengan dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut kemudian kami tuangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah tidak lepas dari SDM yang memadai, amanah, transparan, profesional dan bertanggung jawab, sebab dalam pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini cukup kompleks dan membutuhkan sistem keuangan sekolah yang berusaha menyediakan sumber daya yang cukup sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar, masyarakat juga aktif terlibat dalam membangun dan memajukan sekolah sehingga tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini dilakukan profesional dan berdasarkan kesepakatan bersama dengan kepala sekolah, tim manajemen dana bantuan operasional sekolah dan komite sekolah serta wali murid. Semua pihak terkait melakukan musyawarah atau rapat terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah, mereka memberikan masukan, saran, arahan dan pendapat dan ide-ide positif untuk kemajuan sekolah. Selain itu, hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan menjadi bukti atas kesepakatan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah di SMAN 1 Gerung Lombok Barat.

Proses pelaksanaan pengelolaan dana BOSS dan Dana BPP di sekolah, melaksanakan kegiatan antara lain tentang pertanggungjawaban dan pelaporan yang dilakukan secara rutin di SMAN 1 Gerung Lombok Barat. Pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah di SMAN 1 Gerung Lombok Barat dilakukan melalui beberapa tahapan pokok yaitu: (1) membuat pembukuan, (2) Bukti Pengeluaran, dan (3) pelaporan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan temuan peneliti di lapangan bahwa masalah utama dalam pelaporan dana BOS adalah keterlambatan penyampaian rincian aset yang dibelanjakan dengan dana BOS yang berdampak pada terlambatnya pelaporan ke BKAD Lombok Barat. Untuk pelaporan barang yang menjadi aset daerah,

dilaporkan ke Bidang Aset sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu dalam Laporan Barang Pengguna Tahunan dengan format Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan Laporan Mutasi Barang sesuai klasifikasi asetnya dan selanjutnya dicatat dalam neraca Pemerintah Lombok Barat.

Dana bantuan operasional sekolah memiliki manfaat yang sangat besar bagi sekolah, sebab keberadaan dan bantuan operasional sekolah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan sekolah tetapi juga berdampak pada anggaran sekolah, aktivitas guru, hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta pengeluaran sekolah. Pembiayaan sekolah merupakan proses yang kompleks dengan beberapa tujuan yaitu, sistem keuangan sekolah berusaha untuk menyediakan sumber daya yang cukup sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar tetapi pada saat yang sama sumber daya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin, pembuat kebijakan tidak selalu tahu cara terbaik untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah mereka meskipun pembiayaan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Sebab sumber daya manusia sekolah yang baik, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan dan penggunaan (pengelolaan) keuangan dana bantuan operasional sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada sekitar SMA Negeri 1 Gerung Lombok Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Semua kegiatan yang menghasilkan output yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan biaya yang cukup. Menurut Rohiat (2010) bahwa pengembangan manajemen sekolah yang sesuai dengan SNP sesuai dengan program sekolah dapat dikembangkan di antaranya dengan: a) peningkatan kerja sama dengan *masyarakat*, b) implementasi prinsip kemandirian, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan sustainabilitas program sekolah, Rohiat, (2016). Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan. Hal ini dikarenakan biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan di sekolah.

Bantuan operasional mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar, (Mahmud Yunus, 2016). Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana bantuan operasional yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus terdaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Efek dari anggaran sekolah pada hasil siswa adalah berbagai karakteristik sekolah mempengaruhi baik anggaran sekolah serta kinerja siswa, pengeluaran anggaran tidak dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen dalam pendidikan.

Dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan

ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan pembayaran honor.

Dana bantuan operasional sekolah mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik, (Fattah Nanang, 2000). Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah. Pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan 13 item tata kelola yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam dana bantuan operasional sekolah tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara dana bantuan operasional sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti koperasi sekolah.

Dengan demikian, Implementasi bantuan operasional sekolah merupakan suatu program dinamis, dimana pelaksanaan program harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan harus dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan bersama sertamampu mencapai tujuan yang diharapkan dari dijalankannya program ini. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah seluruhnya telah diatur di dalam Juknis bantuan operasional sekolah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan setiap tahun. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah berkaitan erat dengan transparansi serta laporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah. Tiap sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membentuk Tim Manajemen BOS tingkat sekolah sebagai pihak-pihak yang diberikan mandat serta tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola dana yang diberikan untuk akhirnya dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tim manajemen bantuan operasional sekolah tingkat sekolah sendiri terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, serta komite

Membuat Pembukuan

Pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperbolehkan sekolah, untuk program dana bantuan operasional sekolah, pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, dengan buku yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, Realisasi penggunaan dana per sumber adalah format keuangan yang terintegrasi dan singkat/padat (*condensed*) dan merupakan satu-satunya laporan yang disampaikan kepada tim manajemen BOS kabupaten. Format ini adalah format multi sumber dana, sehingga harus memuat laporan penerimaan dan penggunaan uang dari sumber dana di sekitarnya.

Kedua, Buku Kas Umum, Buku Kas Umum mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana BOS, penguatan pajak serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral. Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing sumber dana secara terpisah, kecuali apabila sekolah hanya mempunyai satu rekening tabungan yang berfungsi untuk menampung seluruh sumber penerimaan sekolah maka Buku Kas Umum yang dibuat oleh sekolah hanya satu. Dalam pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga yaitu: a) Kolom penerimaan: dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro

dari bank. b) Kolom pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Format ini harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu berkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu bank atau buku pembantu (buku pembantu kas/buku pembantu bank/atau buku pembantu pajak) dan format yang telah diisi ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

Ketiga, buku kas pembantu, buku kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Format ini harus dibukukan per transaksi dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

Keempat, Buku Bank Pembantu, buku pembantu bank mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan/pengeluaran yang dilaksanakan Khusus melalui bank dengan cara antara lain, penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan pembayaran dengan cek. Sumber informasi untuk penyusunannya adalah semua transaksi eksternal baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan melalui bank dan transaksi internal yang berupa pengambilan uang kas di bank dan penyetoran uang kas untuk disimpan di bank. Format ini harus dilakukan per transaksi kemudian disampaikan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, tim manajemen BOS Kabupaten, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

Kelima, Dalam hal pembukuan yang dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetakkan BKU dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menata usahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani kepala sekolah dan bendahara.

Keenam, Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadian. Sedangkan uang tunai ada di kas tunai tidak lebih dari 10 juta. Dan apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, buku kas umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran tidak boleh dibawa dan harus disimpan dikantornya.

Dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan Pasal 28, (Kemendikbudristek, 2022) dijelaskan bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan dilakukan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pembukuan adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan teratur dalam mengakumulasi semua jenis data dan informasi tentang keuangan yang terdiri atas kewajiban, penghasilan, harta, biaya dan modal (Selviana Al-Jannah & Qolbi Khoiri, 2023). Jumlah nilai pemberian serta pendapatan barang atau jasa, diakhiri dengan penyusunan kas harian dan buku besar berupa neraca, serta laporan laba rugi sesuai periode tahun tersebut. Mengenai pembukuan yang telah dijabarkan dalam UU menekankan pada seluruh pengusaha tentang pentingnya pembukuan. Sebab pembukuan pada internal perusahaan merupakan dasar utama yang menjadi fondasi dari sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi tercatat dapat diketahui pergerakan keuangan perusahaan secara rinci.

Pembukuan keuangan menurut (Dedi Supriadi, 2015) juga diartikan sebagai proses pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu lembaga/perusahaan. Sebuah lembaga melakukan berbagai transaksi keuangan melalui biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang dihasilkan, yang semuanya harus dicatat. Pencatatan ini membantu perusahaan memahami pola biaya dan penjualan sementara juga membantu dalam peramalan dan pengambilan keputusan. Data keuangan yang dicatat oleh seorang pemegang buku digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. Pembukuan merupakan bagian integral dari setiap perusahaan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Dengan demikian, pembukuan bagian penting dan urgen dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, sebab pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan teratur dalam

mengakumulasikan semua jenis data dan informasi tentang keuangan yang terdiri atas kewajiban, penghasilan, harta, biaya dan modal. Jumlah nilai pemberian serta pendapatan barang atau jasa, diakhiri dengan penyusunan kas harian dan buku besar berupa neraca, serta laporan laba rugi sesuai periode tahun tersebut.

Pembukuan pada internal sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan dasar utama yang menjadi fondasi dari sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi tercatat dapat diketahui pergerakan keuangan sekolah secara rinci. Pembukuan menjadi langkah awal dari kegiatan akuntansi yang merupakan landasan paling dasar dalam proses akuntansi. Segala kegiatan akuntansi akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan benar dan teliti. Pembukuan mengacu pada aspek penyimpanan catatan akuntansi, dalam hal ini semua informasi mengenai transaksi dan aktivitas keuangan suatu bisnis termasuk di dalamnya (Copeland, 2013). Jadi, dapat dipahami bahwa Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan merupakan tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan.

Bukti Pengeluaran

Bukti pengeluaran juga merupakan bagian penting dalam pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMAN Negeri 1 Gerung Lombok Barat. *Pertama*, Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti transaksi yang sah. *Kedua*, Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai nominal Rp 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai Rp 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 10.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- juga dikenakan bea materai dengan tarif Rp 10.000,-.

Ketiga, Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. *Keempat*, Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. *Kelima*, Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan lunas di bayar oleh bendahara. *Keenam*, Segala jenis bukti pengeluaran harus di simpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Bukti pengeluaran adalah aspek pencatatan transaksi keuangan sekolah Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan memerlukan kumpulan bukti transaksi perusahaan untuk memudahkan prosesnya. Sehingga dengan adanya bukti ini, maka akan membantu dalam memonitor pendistribusian dana operasional perusahaan. Bukti pengeluaran sebuah pencatatan dari segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas perusahaan. Jadi, seluruh transaksi pengeluaran perusahaan baik itu dikeluarkan untuk keperluan pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan akan dimasukkan ke dalam bukti kas keluar.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa bukti pengeluaran dilakukan dengan membuat bukti keluar kas mulai dari keterangan sekolah tanggal terjadinya transaksi, nama barang atau jasa, jumlah kas yang dikeluarkan. bukti pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara tunai, bukti pembayaran utang kepada pihak mitra, informasi pembayaran gaji karyawan, bukti retur pembelian barang yang dilakukan secara tunai, informasi neraca saldo yang seimbang, bukti pembelian aset tetap yang dilakukan secara tunai, informasi pembayaran berbagai beban dan lainnya.

Setiap hasil laporan kegiatan bahwa format bukti kas keluar juga disertai tanda tangan setiap bagian keuangan, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, tim pengelola dana bantuan operasional sekolah dan lainnya.

Adanya bukti pengeluaran ini bertujuan untuk menampilkan hasil informasi pengeluaran keuangan sekolah yang dikelola. Bukti pengeluaran ini disimpan supaya nantinya bisa mempermudah bagian keuangan dalam memeriksa apabila terjadi kesalahan perhitungan atau pelaporan keuangan.

Kaitannya dengan bukti pengeluaran (bukti kas keluar) ini dijelaskan bahwa bukti pengeluaran adalah aspek pencatatan transaksi keuangan sekolah. Bukti pengeluaran (bukti kas keluar) adalah salah satu aspek

penting dalam pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan memerlukan kumpulan bukti transaksi perusahaan untuk memudahkan prosesnya. Sehingga dengan adanya bukti ini, dapat membantu semua pihak dalam memonitor pendistribusian dana operasional sekolah.

Bukti kas keluar adalah seluruh catatan dan dokumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan adanya pengeluaran sejumlah uang perusahaan. Contoh bukti kas keluar adalah fraktur pajak, nota pembelian stok, struk belanja dan keperluan lainnya. Bukti kas keluar adalah salah satu aspek penting dalam pencatatan transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan memerlukan kumpulan bukti transaksi sekolah untuk memudahkan prosesnya. Bukti pengeluaran (bukti kas keluar) juga adalah sebuah pencatatan dari segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas perusahaan. Jadi, seluruh transaksi pengeluaran perusahaan baik itu dikeluarkan untuk keperluan pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan akan dimasukkan ke dalam bukti kas keluar. Format bukti kas keluar harus berisikan beberapa keterangan, mulai dari keterangan perusahaan, tanggal terjadinya transaksi, nama barang atau jasa, hingga jumlah kas yang dikeluarkan. Selain itu, dalam format bukti kas keluar juga wajib disertai tanda tangan setiap bagian keuangan, seperti direktur keuangan, manajer keuangan, dan sebagainya.

Jadi, dapat dipahami bahwa bukti pengeluaran (bukti kas keluar) merupakan bukti semua dokumen pencatatan yang menunjukkan pengeluaran sejumlah uang perusahaan. Contoh bukti kas keluar adalah pembelian perlengkapan perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, alat tulis kantor, dan keperluan lainnya.

Pelaporan

Langkah selanjutnya pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMAN 1 Gerung Lombok Barat adalah membuat pelaporan dana bantuan operasional sekolah. Laporan merupakan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana bantuan operasional sekolah.

Pelaporan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. *Kedua*, Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. *Ketiga*, Laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dari ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS tingkat Kabupaten cukup menggunakan format realisasi penggunaan dana per sumber dana. Sedangkan format Buku Kas Umum, format Buku Kas Pembantu, dan format Buku Bank Pembantu beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di sekolah.

Hasil observasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan prosedur atas manajemen atau pengelolaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Dimana jumlah dana bantuan operasional sekolah yang diterima dari pemerintah kemudian dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, sesuai pedoman dan juknis serta aturan yang berlaku, untuk kegiatan operasional sekolah. Artinya besarnya dana bantuan operasional sekolah yang diterima sebanding atau sama dengan pengeluaran dana bantuan operasional sekolah tersebut. Dan jumlahnya sangat tergantung pada jumlah siswa yang ada di SMAN 1 Gerung Lombok Barat itu sendiri. Dalam penggunaannya dan pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan, efektif dan efisien guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan sekolah khususnya di SMAN 1 Gerung Lombok Barat.

Kaitannya dengan pelaporan ini dijelaskan pelaporan merupakan aktivitas pencatatan tentang suatu kegiatan. Menurut (Christianingrum, 2018) menyatakan bahwa “pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang dengan kegiatan tertentu. Menurut (Mujayaro & Rohmat, 2020) dalam buku Supervisor 4.0 Essential Points, dijelaskan laporan adalah informasi tertulis yang ditujukan untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Informasi yang terkandung di dalamnya bermanfaat untuk membuat keputusan penting di masa depan, (Haikal Adriansyah & Maftuhah,

2023). Istilah lainnya laporan adalah gambaran dari 5W1H yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu yang dilaporkan itu terjadi.

Jadi, laporan merupakan bentuk penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang terpenting dalam laporan adalah fakta dan data yang dicantumkan adalah hal yang nyata tanpa dibuat-buat. Namun, tentu penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan yang salah satunya adalah waktu dalam pengamatan yang dilakukan dan perlunya dilihat lebih lanjut lagi terkait dengan penerapan penggunaan dana BOS dan BPP ini apakah sudah semakin baik atau tidak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan penggunaan dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak SMAN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat sudah dilaksanakan dengan baik, yang meliputi (1) Pembentukan Tim Kerja Keuangan Sekolah, (2) Perencanaan Bersumber pada Platform Raport Pendidikan (3) Pembuatan RKAS BOS dan RAPBS BPP, (4) Permasalahan Perencanaan dan Teknik Mengatasinya. Namun, hal tersebut perlu terus menerus untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana oleh oknum-oknum tertentu sehingga kebermanfaatan dari dana BOS dan BPP ini dapat digunakan dengan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, et. a. (2018). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Aulia Riski. (2018). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Universitas Negeri Padang.
- Bellah Khofifah & Muhammad Syaifudin. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Penggerak. *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 3(8).
- Christianingrum, R. (2018). The Effect of Education Budgets on Indonesian Education Development. *Jurnal Budget*, 3(2).
- Copeland, J. F. W. & T. E. (2013). *Manajemen Keuangan* (Edisi Terj). Binapura Aksara.
- Dedi Supriadi. (2015). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Remaja Rosdakarya.
- Didin Kurniadin & Imam Machali. (2014). *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Donnelly, C. and B. F. (2003). *Budgeting for Better Performance*. ECIA 9DD.
- E. Mulyasa. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah Profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Fattah Nanang. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Haikal Adriansyah & Maftuhah. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>
- Harsono. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Pustaka Publisher.
- Inggit Hascaryani. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Mencapai Tujuan Sekolah di SMP 1 Ceper*. Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Kemendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. In *Kemendikbudristek*.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Mahmud Yunus. (2016). *Implementasi Manajemen Pembiayaan terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di SD*

- 5905 *Pengelolaan Dana BOS dan Dana BPP Sekolah Penggerak - Lalu Muhamad Sirajudin, Muhammad, L. M. Nurul Wathoni, Ismail, Yudin Citriadin*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7587>
- Negeri 1 Tonggolan Klaten Jawa Tengah*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Mulyadi, D., & Mardiana, R. (2022). Sekolah Penggerak : Does Curriculum Design Made Fit with the Program? *Adpebi International Journal of ...*, 1(1).
- Munir Yusuf. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Lembaga Penerbit Kampus.
- Nanang Fattah. (2018). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, 151–160. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2965>
- Nur Faizah. (2020). *Manajemen Sumber Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Santri (Study Multi Situs Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Riyadlul Jannaj Pacet)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rusdin Pohan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Ar-Rijal Institute.
- Sarifah. (2023, October). Dukaan Penyalahgunaan Dana BPP-Orang Tua Siswa SMAN 6 Temui DPRD Kalteng. *Www.Tabengan.Co.Id*.
- Selviana Al-Jannah & Qolbi Khoiri. (2023). Efisiensi Anggaran Pendidikan dan Akuntabilitas Dana BOS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 05(03).
- Suharsini Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Syahrudin, A. (2019). *Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Langsa)*. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Titis Anis Fauziyah. (2023, January). Ombudsman Jateng Terima Puluhan Laporan Soal Pungutan di Sekolah Negeri. *Ombudsman.Go.Id*.
- Wahyudi, S. (2023). Kasus Korupsi Dana BOS Jalan Terus, Kepsek SMK Mustopa Kamil Kembali Jadi Tersangka. *Jpp.Com*.
- Zaenab Hanim, et. a. (2023). Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Swasta Untuk Pemenuhan Capaian Kinerja. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2). <https://doi.org/10.29210/020232813>